



LAPORAN AKHIR

KEGIATAN

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI

PANNGAN (P2KP)

TAHUN 2018



DINAS PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan kurnia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan akhir Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dimana tahun 2018 ini mendapat 5 lokasi yang tersebar di 5 kecamatan.

Kegiatan Percepatan penganekaragaman ini bertujuan untuk meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan upaya yang dilakukan untuk pencapaian skor tersebut adalah Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari, Kampanye Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi, sosialisasi untuk mengkonsumsi menu non beras non terigu melalui survei konsumsi masyarakat Pesisir Selatan baik untuk wilayah penerima kegiatan P2KP dan Survei Konsumsi untuk Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan P2KP tahun 2018 ini Dinas Pangan selalu berkoordinasi dengan pihak nagari dan kecamatan sebagai aparat terdekat dari KWT dan dengan TP-PKK Nagari sehingga terkoordinasi dengan kelompok dasa wisma yang ada di Nagari dan Kecamatan.

Demikian disampaikan, kami menyadari laporan ini tidak terlepas dari kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, demi kesempurnaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Desember 2018

KEPALA DINAS PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



ALFIS BASYIR, SE.M.Hum

NIP. 19700731 199403 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan hak azasi manusia dimana pemenuhan kebutuhannya bagi setiap individu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Tidak hanya hanya sekedar memenuhi pangan tetapi bagaimana kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas gizi juga menjadi perhatian dalam Undang-Undang pangan tersebut. Tindak lanjut dari Undang-Undang Pangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana dalam pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganeekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan sehingga akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan.

Penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 82 untuk target pada tahun 2019. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan. Kegiatan Pemanfaatan pekarangan merupakan kegiatan yang sudah lama dilaksanakan dalam rangka menyediakan bahan makanan atau komoditas pertanian yang bukan saja berfungsi sebagai penyediaan bahan makanan yang beranekaragam akan tetapi juga dapat berfungsi sebagai penghasilan keluarga. Keragaman konsumsi pangan masyarakat merupakan unsur utama dalam peningkatan mutu gizi yang dimakan oleh masyarakat. Di Kabupaten Pesisir Selatan Skor PPH mengalami fluktuasi mulai dari 75,7 pada tahun 2009 naik menjadi 77,5 pada tahun 2010, kemudian turun lagi pada tahun 2011 menjadi 77,3 dan bahkan cenderung mengalami penurunan lagi ditahun 2013 menjadi 77,1 dan pada tahun 2014 menjadi 74,9, dan untuk tahun 2015 ini naik menjadi 77,2, sementara tahun 2016 mengalami penurunan drastis menjadi 72,9, hal ini disebabkan karena pengurangan kuesioner uji bahan pangan dari 220 bahan uji tahun sebelumnya dan tahun 2016 ini menjadi 110 bahan uji, dan Angka Kecukupan energi juga mengalami perubahan dari 2000 kkal/kap/hari menjadi 2150 kkal/kap/hari, dan Angka Kecukupan Protein pun bertambah dari 52 gram/kap/hari menjadi 57 gram/kap/hari, dan untuk tahun 2017 ini skor pola pangan harapan kabupaten Pesisir Selatan sebesar 72,09, dan terakhir skor pola pangan harapan 2018 sebesar 77,9, dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatanpun sudah mulai mengetahui betapa pentingnya mengkonsumsi

pangan hewani serta sayur dan buah. Bahkan konsumsi kelompok padi-padian masih sangat besar dengan proporsi sebesar 60,9 persen. Situasi seperti ini terjadi karena pola konsumsi pangan masyarakat sudah beragam, bergizi seimbang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan menjelaskan penekanan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.

Secara umum upaya penganeekaragaman pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal melalui kegiatan percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal dengan berkerjasama antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan masyarakat, dimana di Kabupaten Pesisir Selatan telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya lokal.

Untuk proses pencairan dana Bantuan Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan dimulai dari awal tahun 2018 dan telah dilakukan Pengumpulan data Kelompok Wanita yang akan diidentifikasi untuk penerima bantuan pemerintah tahun anggaran 2018. Pada bulan Januari dilakukan pengumpulan data dan identifikasi sekaligus verifikasi terhadap kelompok wanita tani penerima bantuan pemerintah dan bulan Pebruari dilakukan penetapan lokasi penerima manfaat dan penyuluh pendamping kegiatan P2KP melalui SK KPA Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat dan bulan Maret dilakukan penandatanganan SPK antara PPK Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Ketua Kelompok, pada bulan April melakukan pelatihan penyuluh pendamping kegiatan P2KP sekaligus penyusunan RKKA, dan realisasi anggaran P2KP tahun 2018 sampai akhir Nopember 2018 sebesar 98%.

Jadwal pelaksanaan Kegiatan P2KP Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal/Bulan	Kegiatan	Ket
1.	Januari 2018	Pengumpulan data dan identifikasi sekaligus verifikasi Kelompok Wanita calon penerima Bantuan pemerintah P2KP.	
2.	Pebruari 2018	Penetapan SK kelompok penerima Bantuan pemerintah P2KP	
3.	Maret 2018	Penandatanganan SPK sekaligus menyusun RKKA dan Dana masuk ke Rekening Kelompok	
4.	April 2018	Melaksanakan pelatihan kepada pendamping desa/nagari	

5.	Juni s/d September 2018	Dilakukan pencairan dana kerekening kelompok penerima manfaat	
6.	Desember 2018	Pertanggung jawaban laporan kegiatan akhir.	

B. Tujuan umum

Secara umum tujuan P2KP adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang B2SA yang diindikasikan dengan meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH).

Tujuan khusus

- Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras.
- Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga.
- Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

C. Sasaran

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui konsep KRPL tahun 2018 dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani yang telah terbentuk melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat pada 5 lokasi nagari dan kecamatan, dan diutamakan kelompok yang telah melaksanakan kegiatan secara swadaya.

D. Indikator Keluaran

Keberhasilan kegiatan P2KP akan terlihat dari indikator berikut yaitu:

- Jumlah kelompok wanita yang berpartisipasi dalam pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga yang B2SA.
- Jumlah usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, dan penyediaan pangan sumber karbohidrat dari bahan pangan lokal yang dikembangkan.
- Meningkatnya motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam gerakan P2KP di pusat dan daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Data Kelompok dan Lokasi Penerima Manfaat

Kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui konsep KRPL dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT)/dasawisma yang beranggotakan minimal 30 rumah tangga dengan kegiatan meliputi :

1. Sosialisasi pemanfaatan pekarangan melalui pendampingan dan pelatihan.
2. Pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan
3. Pembuatan kebun bibit
4. Pengembangan pekarangan anggota
5. Pembuatan dan Pengembangan Kebun Sekolah
6. Pendampingan dan penyuluhan pangan B2SA praktek/demonstrasi penyediaan menu B2SA
7. Pengolahan hasil KRPL

Pada tahun 2018 ini kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL dilaksanakan pada 5 lokasi penerima manfaat dengan sumber dana APBN.

Untuk Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2018 sesuai dengan Himbauan Gubernur Sumatera Barat tentang beberapa lokasi pilot proyek untuk Nagari Mandiri Pangan, dimana Kabupaten Pesisir Selatan mendapat 2 lokasi tersebut yaitu nagari Koto Taratak dan nagari Sungai Tunu Utara, sehingga 2 nagari tersebut mendapatkan lokasi penerima manfaat ditambah dengan 1 dasawisma dan 2 lagi lokasi yang sudah melaksanakan kegiatan KRPL ini secara swadaya. Dalam penyelenggaraan kegiatan P2KP Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan Tim Pengerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan.

Mekanisme pengembangan optimalisasi lahan pekarangan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Pembentukan kelompok pelaksana kegiatan
Tim Teknis P2KP Kabupaten Pesisir Selatan melakukan identifikasi CP/CI sesuai proposal yang masuk dalam E-Proposal tahun 2018 dan berkoordinasi dengan walinagari setempat untuk menentukan kelompok penerima manfaat yang memenuhi kriteria sesuai dengan petunjuk teknis P2KP yang meliputi identitas kelompok.
2. Identifikasi kebutuhan
3. Penyusunan rencana kegiatan
4. Pendampingan dan pelatihan
5. Pembuatan dan pengelolaan kebun bibit
6. Pengembangan demplot kelompok
7. Penataan kawasan

Selanjutnya mekanisme penetapan lokasi sebagai berikut :

1. Tim Teknis P2KP Kabupaten Pesisir Selatan melakukan identifikasi CP/CI sesuai proposal yang masuk dalam E-Proposal tahun 2018 dan berkoordinasi dengan walinagari setempat untuk menentukan kelompok penerima manfaat yang memenuhi criteria sesuai dengan petunjuk teknis P2KP yang meliputi identitas kelompok.
2. Melakukan seleksi dari CP/CL yang meliputi seleksi administrasi dari proposal, dan seleksi aspek teknis yang langsung ke lapangan/kelompok. Calon yang memenuhi syarat dari syarat administrasi dan seleksi aspek teknis kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima manfaat.

Selanjutnya ditetapkan Lokasi Penerima Manfaat Dana Bantuan Pemerintah Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat nomor 466/12/Pangan/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 sebagai berikut :

Kelompok Penerima Manfaat Dana Bantuan Pemerintah tahun 2018

No	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan	Ketua Kelompok
1.	KWT/Dasawisma Anggrek II	Kapuh	Koto XI Tarusan	Yetsusriyenti
2.	KWT Al Ikhlas	Sago Salido	IV Jurai	Sarmiati
3.	KWT The Ampale Star	Koto Taratak	Sutera	Yari Sonetra
4.	KWT Bundo Saiyo	Kambang Timur	Lengayang	Nurhayati.K
5.	KWT Restu Ibu	Sungai Tunu Utara	Ranah Pesisir	Jusni Wati

B. Hasil Identifikasi Potensi Wilayah

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN
MELALUI
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)

A. Rekapitulasi Hasil Pertemuan Kelompok

Pertemuan kelompok sudah dilaksanakan oleh masing-masing kelompok penerima manfaat di lokasi KWT masing-masing, yang juga dihadiri oleh dari Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Walinagari, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan, Tim Penggerak PKK, Pendamping kelompok serta semua anggota kelompok.

Pertemuan yang dilakukan oleh pendamping secara rutin minimal 2 kali dalam satu bulan dalam pertemuan tersebut pendamping memberikan wawasan dan berbagi pengalaman dengan kelompok wanita tani bagaimana mengolah pekarangan yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 nagari di 5 Kecamatan. Setiap Nagari terdiri dari 1 kelompok yang beranggotakan minimal 30 rumah tangga untuk penerima manfaat tahun 2018 yang lokasinya saling berdekatan dalam satu kawasan.

Disamping pertemuan yang dilakukan oleh pendamping di kecamatan/nagari, Kepala Dinas Pangan dan Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta pendamping kabupaten juga melaksanakan pertemuan terhadap kelompok penerima manfaat di lokasi KWT yang bersangkutan.

B. Pengembangan Pekarangan Anggota sebesar Rp. 15.000.000,-

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan bentuk integrasi dari sekumpulan pekarangan untuk memenuhi penyediaan pangan rumah tangga. Penataan lingkungan kawasan diperlukan untuk mengatur Rumah Pangan Lestari agar kelompok dapat membentuk lingkungan asri dan nyaman serta menjadi daya tarik bagi orang lain untuk melakukan replikasi. Penatan pekarangan dan pemanfaatan lahan pekarangan harus disesuaikan dengan lahan yang tersedia di anggota berdasarkan luas lahan dan pemanfaatannya.

Dari 5 (lima) kelompok penerima manfaat ini dari dana yang masuk ke rekening kelompok sebesar Rp. 15.000.000,- sudah mencairkan dana pemanfaatan pekarangan anggota sebesar 100% dan sudah dimanfaatkan oleh anggota kelompok bersama keluarga selain dikonsumsi oleh masing-masing anggota keluarga dan sisanya sudah dijual sehingga mendapatkan keuntungan selain meningkatkan gizi keluarga juga menambah penghasilan dari anggota keluarga tersebut, bahkan ada beberapa anggota tersebut sudah mempunyai kas perorang sekitar Rp 100.000/orang.

C. Pembuatan Kebun Bibit dan Demplot

1. Pemanfaatan kebun bibit sebesar Rp. 20.000.000,-

Kebun bibit merupakan salah satu sumber bibit dalam pengembangan dan keberlanjutan KRPL, sebagai upaya menuju terciptanya rumah pangan lestari dengan memanfaatkan pekarangan secara optimal untuk budidaya tanaman sayuran, pangan, ternak dan ikan, menggunakan teknologi hemat lahan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari, serta menambah pendapatan keluarga.

Pada Kebun bibit yang telah dibangun disarankan bibit yang dikembangkan adalah bibit tanaman sayuran, buah dan umbi-umbian. Luas kebun bibit yang disarankan kepada kelompok minimal seluas 25 m², dengan bangunan yang kokoh dari besi baja ringan dan diharapkan semua kebun bibit tersebut dapat bertahan minimal untuk 5 tahun kedepan. Kebun bibit ini menyuplai bibit untuk dijual sehingga dikembangkan oleh anggota, dan masyarakat sekitarnya serta fasilitas umum lainnya seperti kantor wali nagari, kantor camat dan lainnya. Kebun bibit juga disarankan dekat dengan lokasi rumah anggota sehingga terjangkau dan mudah pemeliharaannya dan dibuatkan jadwal piketnya, tapi untuk pengelolaan keuangan ditunjuk ketua dan sekretaris di masing-masing kebun bibit. Secara umum fisik bangunan kebun bibit untuk 5 kelompok tahun 2018 sudah dibangun 100% oleh kelompok.

Dari 5 (lima) kelompok penerima manfaat ini sudah mencairkan dana kebun bibit 100% yang digunakan untuk pembangunan fisik rumah kebun bibit serta pembelian media tanam berserta benih dan bibit tanaman sesuai dengan RKKA yang diusulkan pada awal kegiatan, dan sampai saat ini pemanfaatan kebun bibit sudah dirasakan oleh kelompok walaupun belum maksimal.

2. Pemanfaatan untuk kebun kelompok/demplot sebesar Rp. 7.000.000,-

Demplot adalah kawasan yang terdapat dalam kawasan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi pencontohan, temu lapang, tempat belajar dan praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama kelompok. Dalam mengembangkan KRPL, setiap kelompok wajibn membuat dan melaksanakan pengembangan demplot pekarangan sebagai Sekolah Lapang (SL) atau tempat belajar/praktek sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan. Fasilitas pekarangan percontohan ini antara lain berupa bimbingan, pembelian sarana produksi, administrasi dan manajemen kelompok.

Pada Kebun kelompok /demplot bibit yang ditanam disesuaikan dengan poptensi yang ada pada desa tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok bahkan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dan pada umumnya semua kelompok sudah melaksanakan panen di demplot masing-masing.

Dari 5 (lima) kelompok penerima manfaat ini sudah mencairkan dana kebun kelompok/demplot 100%, dan sudah dimanfaatkan oleh kelompok, bahkan beberapa kelompok sudah mempunyai

kas kebun kelompoknya, karena hasil kebun tersebut selain dikonsumsi oleh anggota kelompok bahkan oleh masyarakat sekitar, ada juga yang dijual sehingga mempunyai kas kelompok.

D. Pengembangan Kebun Sekolah sebesar Rp. 5.000.000,-

Pembuatan kebun sekolah yang dilakukan oleh masing-masing Dasawisma/KWT adalah pada sekolah yang berada pada lokasi wilayah kelompok dengan menanam berbagai macam jenis sayuran dengan menggunakan media tanam, yang sebelumnya kelompok juga membuat media tanam seperti rak-rak dan bahkan juga ada kolam ikannya, ini dengan tujuan agar siswa lebih mengenal tentang berbagai tanaman sayuran yang merupakan sumber vitamin dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Dalam kegiatan ini juga dapat mensosialisasikan atau mempromosikan tentang penganekaragaman konsumsi pangan atau pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Dari 5 (lima) kelompok penerima manfaat ini sudah mencairkan dana pembuatan kebun sekolah sebesar 100% dan sudah dimanfaatkan oleh pihak sekolah baik oleh guru-guru dan siswa selain dikonsumsi oleh pihak sekolah sisanya juga dijual untuk membeli bibit selanjutnya untuk keberlanjutan kegiatan di sekolah tersebut.

E. Pendampingan dan Penyuluhan Menu B2SA sebesar Rp. 3.000.000,-

Pendampingan

Kegiatan optimalisasi lahan pekarangan dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan kelompok yang telah terbentuk di wilayah tersebut, yang didampingi oleh seorang pendamping yang berada di wilayah kerjanya.

Mekanisme penetapan pendamping :

1. Pendamping Kabupaten adalah PNS yang menangani kegiatan P2KP di Kabupaten, dan yang telah mengikuti apresiasi P2KP, yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ke Provinsi serta ditetapkan melalui Keputusan KPA di Provinsi.
2. Pendamping kelompok di nagari adalah penyuluh yang dapat memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan KRPL dengan baik. Pemilihan pendamping kelompok di nagari berkoordinasi dengan Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Walinagari, yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ke Provinsi untuk ditetapkan melalui Keputusan KPA di Provinsi.

Selanjutnya ditetapkan Pendamping Kabupaten dan Nagari Dana Bantuan Pemerintah Tahun 2018 sebagai berikut :

Nama Pendamping Kabupaten Penerima Manfaat
Dana Bantuan Pemerintah tahun 2018

No	Kabupaten	Nagari	Jabatan
1.	Pesisir Selatan	Erliza Desilianti, SH,MM	Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Pangan

Nama Pendamping Kelompok Penerima Manfaat
Dana Bantuan Pemerintah tahun 2018

No	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan	Ketua Pendamping
1.	KWT/Dasawisma Anggrek II	Kapuh	Koto XI Tarusan	Sumarlin
2.	KWT Al Ikhlas	Sago Salido	IV Jurai	Aznetty
3.	KWT The Ampale Star	Koto Taratak	Tarusan	Iskandar
4.	KWT Bundo Saiyo	Kambang Timur	Lengayang	Ira Jusma
5.	KWT Restu Ibu	Sungai Tunu Utara	Koto XI Tarusan	Sri Fadillah Wlnata

Kegiatan pengolahan hasil dari lahan pekarangan ini telah dilakukan sosialisasi tentang pengolahan makanan dengan konsep beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Praktek pengolahan Hasil yang dilakukan bertujuan agar dapat memotivasi anggota untuk dapat mengolah tidak hanya dari satu jenis saja tetapi dapat dibuat dengan beragam olahan sehingga keluarga tidak merasa bosan dalam mengkonsumsi makanan.

Tugas Pendamping KRPL Kabupaten

Pendamping KRPL Kabupaten bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di Kabupaten dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Bersama aparat kabupaten melakukan CPCL
2. Melakukan identifikasi potensi aneka tanaman yang dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah Kabupaten.
3. Membimbing an mendampingi pelaksanaan kegiatan P2KP di seluruh desa/nagari penerima manfaat.
4. Memberikan sosialisasi dan pelatihan KRPL kepada pendamping desa/nagari.
5. Merekap laporan pelaksanaan kegiatan kelompok KRPL dari para pendamping desa/nagari.
6. Bersama aparat kabupaten memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KRPL dan menyerahkannya kepada Dinas Pangan Propinsi.

Tugas Pendamping KRPL Desa/Nagari

Pendamping desa/nagari KRPL bertugas mendampingi serta membimbing secara teknis kelompok KRPL di desa dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui pendampingan dan pelatihan
2. Melakukan identifikasi potensi desa/nagari meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan, sayuran, dan buah, peternakan, dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan.
3. Membantu kelompok untuk membuat dan mengolah kebun bibit
4. Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA
5. Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok
6. Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok
7. Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan
8. Membantu kelompok dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah
9. Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan mengumpulkannya kepada pendamping Kabupaten.

Penyuluhan/Sosialisasi Menu B2SA

Sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA dilakukan melalui pembinaan langsung bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan dengan menghimbau untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat selain beras dengan memanfaatkan lahan pekarangan dalam pemenuhan sumber pangan keluarga.

Dari 5 (lima) kelompok penerima manfaat ini sudah mencairkan dana pengolahan Hasil Pekarangan dengan Konsep B2SA sebesar 100% dan sudah dimanfaatkan oleh kelompok khususnya dan masyarakat pada umumnya.

F. Potensi Pemanfaatan Pangan Lokal di Daerah

Potensi untuk memanfaatkan dan mengembangkan Pangan Lokal yang ada di kelompok cukup besar, dilihat dari beragamnya olahan pemanfaatan hasil pekarangan yang dibuat oleh kelompok dengan

memadupadankan hasil pekarangan dengan olahan pangan lokal yang ada pada wilayah kelompok tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), masih ada anggota kelompok yang tidak satu hamparan walaupun demikian masyarakat yang tidak menjadi anggota tetap diberikan bantuan bibit sehingga kawasan bisa terbentuk namun usaha tersebut tidak seluruh kelompok bisa terlaksana, karena masih ada masyarakat yang bukan anggota kelompok diberi bantuan namun mereka tidak mau menanam, tingkat kesadaran masyarakat untuk menanam masih rendah.

Walau demikian dengan adanya dana bantuan pemerintah kegiatan P2KP ini ternyata menjadi pemancing bagi masyarakat di nagari lain dan sudah mulai mencontoh untuk menanam pekarangan mereka dengan membentuk kelompok-kelompok wanita tani. Jadi dengan adanya 75 kelompok yang telah diberi bantuan mulai dari tahun 2010 s/d 2018, baik itu yang bersumber dari dana APBN maupun sumber dana APBD Propinsi Sumatera Barat, maka kelompok memanfaatkan pekarangan sampai saat ini sudah berjumlah lebih dari 75 kelompok.

Untuk perkembangan kegiatan kelompok wanita untuk pengembangan Rumah Pangan Lestari cukup pesat perkembangannya dari kelompok yang ada dari dana APBN dan APBD Propinsi Sumatera Barat saat ini. Kelompok wanita mengolah pekarangan mereka dengan menanam secara swadaya sendiri bahkan mereka telah mendapatkan hasil tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri bahkan mereka sudah bisa menjual. Kegiatan pengembangan pekarangan ini telah tersebar di seluruh kecamatan sebagai percontohan bagi masyarakat di kecamatan.

Pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahun 2018 pada bulan Maret 2018 telah masuk ke rekening kelompok, sehingga dengan beberapa persiapan pencairan dilakukan oleh kelompok dan pendamping pada bulan April s/d September 2018. Sampai saat ini pencairan sudah 100%, dengan jumlah dana bantuan pemerintah adalah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk kelompok baru yang dimanfaatkan untuk Pembuatan Kebun Bibit sebesar Rp. 20.000.000,-, untuk kebun kelompok/demplot sebesar Rp. 7.000.000,- untuk pekarangan anggota sebesar Rp.15.000.000,- . Untuk pembuatan kebun sekolah Rp. 5.000.000,- dan pengolahan hasil pekarangan dengan konsep B2SA sebesar Rp. 3.000.000,-.

G. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian.

a. Permasalahan yang dihadapi.

1. Tingkat kesadaran anggota kelompok dalam mengkonsumsi bahan pangan selain beras masih lemah.
2. Masih lemahnya pengetahuan pendamping dalam menata pekarangan yang asri sebagai sumber pangan keluarga.

3. Dalam melaksanakan pembinaan kelapangan biaya perjalan dinas yang ditetapkan dalam DIPA yaitu Rp. 90.000,- satu orang/hari perjalanan untuk kabupaten Pesisir Selatan biaya tersebut tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan monitoring karena wilayah binaan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup luas dengan jarak tempuh yang terjauh yaitu 14 jam perjalanan pulang pergi atau 230 km dari ibukota Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Dalam operasional kegiatan APBN tidak memenuhi seluruh kebutuhan untuk turun kelapangan karena turun kelapangan biaya BBM dan rental anggaran untuk kebutuhan itu tidak tersedia.

b. Upaya penyelesaian masalah

Upaya penyelesaian masalah yang dilakukan terhadap masalah diatas diantaranya meningkatkan koordinasi kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan, dan lintas sektor terkait pada rapat Dewan Ketahanan Pangan dan pada saat setiap kegiatan dilaksanakan dengan cara :

1. Memberikan sosialisasi melalui demo masak olahan pangan lokal sehingga anggota kelompok bisa menikmati makanan olahan selain beras tersebut memang bisa dilakukan.
2. Melakukan pelatihan penyuluh pendamping tentang pengelolaan pengembangan pekarangan yang tertata dengan asri.
3. Diharapkan untuk melaksanakan kegiatan dan tugas pembantuan perlu disediakan dana penunjang pelaksanaan kegiatan seperti BBM dan rental, karena tanpa adanya biaya penunjang cukup sulit untuk melaksanakan pembinaan karena jarak tempuh antar kelompok dari pusat Kabupaten cukup jauh.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencairan dana bantuan pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 terhadap 5 kelompok, dana untuk penerima manfaat tahun 2018 sudah masuk ke rekening kelompok pada akhir Maret 2018, dan untuk pencairan oleh kelompok dilaksanakan pada bulan April s/d September 2018.
2. Untuk kelompok penerima bantuan pemerintah tahun 2018 ini sebelum mereka menerima bantuan mereka telah melaksanakan kegiatan untuk memanfaatkan pekarangan sehingga saat pelaksanaan program mereka bisa lebih memantapkan pekarangan mereka masing-masing.
3. Dana Operasional pembinaan yang di alokasikan oleh APBN tidak sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Pesisir Selatan karena jarak tempuh masing-masing wilayah binaan berbeda-beda, lokasi terjauh dari kabupaten berjarak 230 km dengan kondisi jalan yang kurang memadai, sehingga lama perjalanan untuk mencapai sasaran lebih kurang 14 jam pulang pergi. Maka dengan jumlah dana Rp. 90.000 per kali pergi tidak mampu melaksanakan pembinaan, walaupun demikian Kabupaten Pesisir Selatan tetap melakukan pembinaan terhadap lokasi tersebut.
4. Dengan adanya kelompok penerima bantuan pemerintah P2KP di masing-masing nagari ternyata dapat dijadikan pemancing terhadap kelompok lain sehingga menambah jumlah kelompok-kelompok baru untuk pemanfaatan pekarangan.

B. Saran

1. Kami mengharapkan biaya operasional pembinaan yang ada di APBN bisa disesuaikan dengan jarak tempuh pembinaan kemudian biaya operasional penunjang pelaksanaan kegiatan juga disediakan sehingga pembinaan yang dilakukan bisa lebih optimal.
2. Program pemanfaatan ini bisa diberikan minimal satu nagari satu program karena hal ini bisa memancing masyarakat sekitar nagari untuk dapat memanfaatkan pekarangan.
3. Perlu adanya program pelatihan terhadap kelompok usaha pangan lokal dalam meningkatkan nilai jual dari produk pangan lokal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pelatihan terhadap pendamping dalam meningkatkan pengetahuan dalam mengembangkan pekarangan perlu ditingkatkan.

